

**Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik
(Studi Kasus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri)
Tahun 2019**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi

Oleh :

Didik

NIM. 16.01.0019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTAMANDIRI
SURAKARTA
2020**

SKRIPSI

**Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik
(Studi Kasus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri)
Tahun 2019**

Oleh :

**Didik
NIM. 16.01.0019**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada tanggal, Juli 2020

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing
Merangkap Anggota Dewan Penguji

Anggota Dewan Penguji

Estiningtyastuti,

Yuni Pristiwati NW, S.E., M.Si

S.E.,M.M.,M.Hum

Tulus Prijanto, S.E., M.H

Surakarta, Juli 2020

Mengetahui

Amru Sukmajati, S.P., M.M

Ketua STIE Swastamandiri



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Didik**

Nim : **16.01.0019**

Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik**

**(Studi Kasus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri) Tahun 2019**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semua telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti/dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh STIE Swastamandiri batal saya terima

Surakarta, Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan

Didik

NIM. 16.01.0019



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik STIE Swastamandiri, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Didik
NIM : 16.01.0019
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada STIE Swastamandiri Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik
(Studi Kasus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri)
Tahun 2019

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini STIE Swastamandiri berhak menyimpan mengalihmedia/fotmatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surakarta
Pada Tanggal : Juni 2020
Yang Menyatakan

Didik
NIM. 16.01.0019



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SWASTAMANDIRI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, Skripsi dengan judul :

**Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik
(Studi Kasus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri)
Tahun 2019**

Oleh :
Didik
NIM. 16.01.0019

Telah saya baca dengan seksama dan saya telah dinyatakan memenuhi standar ilmiah, baik jangkauannya maupun kualitasnya, sebagai kripsi jenjang sarjana (S1)

Pembimbing :

Estiningtyastuti, S.E.,M.M.,M.Hum

Tugas akhir ini telah diserahkan kepada Program Sarjana Jurusan Akuntansi STIE Swastamandiri dan telah diterima sebagai syarat memenuhi jenjang pendidikan Sarja (S1)

Surakarta, Juni 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

Yuni Pristiwati NW, S.E., M.Si

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk ...

1. Terima kasih untuk ayah, ibu, istri dan semua keluargaku atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan.
2. Terima kasih juga yang tak terhingga untuk dosen pembimbing, para dosen pengajar yang dengan sabar mengajar dan membimbing saya selama menimba ilmu di STIE Swastamandiri.
3. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan ijin untuk menggunakan LKjIP tahun 2019 sebagai sumber data penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di STIE Swastamandiri. Terima kasih untuk solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.
5. Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS Ar Ra’d : 11)

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An Najm : 39)

“Barang siapa mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (Riwayat Abu Hurairah RA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya maka skripsi dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Jurusan Akuntansi pada STIE Swastamandiri Surakarta.

Berbagai pihak telah membantu di dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Amru Sukmajati, S.P, M.M, selaku ketua STIE Swastamandiri Surakarta yang telah memberi kesempatan untuk menempuh Program Sarjana Jurusan Akuntansi.
2. Ibu Yuni Pristwati NW, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE Swastamandiri yang telah memberikan kesempatan dan arahan.
3. Ibu Estiningtyastuti, S.E.,M.M.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing sampai dengan penulisan skripsi ini selesai.
4. Ibu Dr. Dra. Yuli Bangun Nursanti, M.Pd, selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan izin sebagai tempat bahan penulisan skripsi.
5. Semua dosen Program Sarjana Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan motivasi, inspirasi, serta menambah wawasan maupun memperoleh cakrawala pengetahuan penullis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan umumnya dan terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel.

Surakarta, Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAKSI	xii
ABSTRAK	xiii
.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Pustaka	5
2.1.1. Pengertian Sistem	5
2.1.2. Tipe Organisasi.....	5
2.1.3. Pengertian Sektor Publik	6
2.1.4. Organisasi Sektor Publik	6
2.1.5. Konsep Dasar Pengukuran Kinerja Sektor Publik	7
2.2. Reviu Penelitian Sebelumnya	15
2.3. Kerangka Penelitian	16

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1. Metode Penelitian.....	19
	3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	19
	3.3. Instrumen Penelitian.....	20
	3.4. Teknik Analisa Data.....	20
	3.5. Pengujian Kredibilitas data	21
BAB IV	ANALISIS DATA	
	4.1. Pengukuran Kinerja Inputdan Output.....	23
	4.2. Pengukuran Kinerja 3E (Ekonomis, Efisiensi, Efektifitas)....	29
	4.3. Pembahasan	35
BAB V	KESIMPULAN	
	5.1. Kesimpulan	38
	5.2. Keterbatasan Penelitian	38
	5.3. Rekomendasi	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pengukuran Nilai Kinerja input Berdasarkan Data Anggaran dan Realisasi Urusan Pendidikan Periode 2019	23
Tabel 4.2	Pengukuran Nilai Kinerja Input Berdasarkan Data Anggaran dan Realisasi Urusan Kebudayaan	25
Tabel 4.3	Pengukuran Nilai Kinerja Output Berdasarkan Data Anggaran dan Realisasi Urusan Pendidikan	26
Tabel 4.4	Pengukuran Nilai Kinerja Output Berdasarkan Data Anggaran dan Realisasi Urusan Kebudayaan (Peningkatan Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Masyarakat)	29
Tabel 4.5	Pengukuran Ekonomi Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2019	31
Tabel 4.6	Pengukuran Kinerja Efisiensi Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019.....	33
Tabel 4.7	Pengukuran Kinerja Efektifitas Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019.....	34
Tabel 4.8	Hasil Pengukuran <i>Value for Money</i> Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019.....	37

ABSTRAKSI

Didik. *Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri) Dalam Meningkatkan Capaian Kinerja Tahun 2019.* Skripsi. Wonogiri : STIE Swastamandiri, 2020

Latar belakang penelitian ini adalah semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pertanggung jawaban para penyelenggara negara atas amanat yang sudah diberikan kepada mereka serta tuntutan untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal melalui program-program yang tepat kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah mendiskripsikan pengukuran terhadap kinerja input, output dan outcome untuk program-program yang dijalankan dinas kemudian melakukan penelitian berdasarkan konsep pengukuran kinerja *Value for Money* yang berfokus pada prinsip 3E yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 berdasarkan pengukuran kinerja *Value for Money*. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : nilai kinerja ekonomi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 mencapai 96.23% sehingga dikategorikan ekonomis, hal ini dikarenakan kedua urusan dapat dilaksanakan dengan menggunakan *input* yang tidak melebihi *input value* yang telah dianggarkan. Sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran untuk hal-hal yang tidak diperlukan; nilai kinerja efisiensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 mencapai 102.61% sehingga dikategorikan efisien, karena kedua urusan mampu menghasilkan tingkat *output* yang lebih tinggi dengan menggunakan tingkat *input* yang lebih rendah; nilai kinerja efektivitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 mencapai 96.23% sehingga dikategorikan cukup efektif. Secara penilaian ekonomis, efisiensi dan efektif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan programnya sudah ekonomis dan efisien, sehingga perlu dipertahankan untuk pelaksanaan program periode berikutnya.

Kata kunci: Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik, *Value for Money*.

ABSTRAK

Didik. Performance Analysis of Public Sector Organizations (Case Study at the Wonogiri District Office of Education and Culture) in Improving 2019 Performance Results. Skripsi. Wonogiri : STIE Swastamandiri,2020.

The background of this research is the increasingly high demands of the community on the accountability of state administrators for the mandate that has been given to them as well as the demands to be able to provide maximum services through appropriate programs to the community as beneficiaries.

This type of research is a case study. The data analysis technique used is to describe measurements of the performance of inputs, outputs and outcomes for programs run by the service and then conduct research based on the concept of Value for Money performance measurement that focuses on the 3E principle of economics, efficiency and effectiveness.

The purpose of this study was to determine the performance of the Office of Education and Culture in 2019 based on performance measurement Value for Money. The conclusions of this study are: The value of economic performance in the Department of Education and Culture Wonogiri in 2019 reached 96.23% so that it is categorized economically, this is because both affairs can be carried out using inputs that do not exceed the input values that have been breached. So there is no waste of budget for things that are not needed; The efficiency performance value at the Wonogiri District Education and Culture Office in 2019 reached 102.61% so that it was categorized as efficient, because both functions were able to produce higher output levels using lower input levels; the value of effectiveness performance at the Education and Culture Office of Wonogiri Regency in 2019 reached 96.23% so that it was categorized quite effective. In terms of economic, efficiency and effective assessment, the Office of Education and Culture in carrying out its programs is already economical and efficient, so it needs to be maintained for the next period of program implementation.

Keywords: Measurement of Public Sector Organization Performance, Value for Money.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik saat ini dirasakan semakin meningkat. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban para penyelenggara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. . Seperti yang diberitakan dalam surat kabar Tribunnews (2017), mahasiswa melakukan demo menuntut adanya transparansi anggaran Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Aksi tersebut dialamatkan kepada Pemerintah Kabupaten Majene yang dinilai tidak transparan dan memotong 10 persen anggaran APBD yang pro rakyat. Selain itu, diberitakan pula peristiwa yang serupa melalui surat kabar detik news (2017), warga Kabupaten Magelang melakukan aksi demo menuntut transparansi dana retribusi desa. Warga menuntut transparansi dana TPR (Tanda Pembayaran Retribusi) Desa Kaliurang dan meminta rekapan dana TPR sejak awal dibangun. Berdasarkan berita tersebut kita dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana peran dan kontribusi masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah saat ini lebih banyak menarik perhatian masyarakat karena mereka mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Situasi ini memicu peningkatan kebutuhan akan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat.

Berdasar Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja (Pasal 5, ayat 2).

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 Ayat 11 disebutkan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), selanjutnya dalam ayat 19 diterangkan bahwa Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang

melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja. Dalam pasal 18 ayat 1 menyebutkan Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepada gubernur/ bupati/ walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dari laporan tersebut akan terlihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran kinerja Pemerintah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money* yang berfokus pada prinsip 3E yaitu ekonomis, efisiensi dan Efektifitas. Konsep *Value for money* dirasakan tepat untuk menilai bagaimana organisasi menggunakan anggaran secara ekonomis untuk menghasilkan *output* yang berkualitas sehingga mampu memberikan hasil berupa pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri) Tahun 2019”

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2019 berdasarkan pengukuran kinerja *input* dan *output*?
- 1.2.2 Bagaimana kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2019 berdasarkan pengukuran kinerja *Value for Money*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2019 berdasarkan pengukuran kinerja *input* dan *output*.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2019 berdasarkan pengukuran kinerja *Value for Money*.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 **Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
Melalui penelitian ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dapat melakukan evaluasi atas kinerja yang sudah dicapai demi peningkatan pelayanan di periode berikutnya.
- 1.4.2 **Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi**
Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.
- 1.4.3 **Bagi Penulis**
Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dengan menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disajikan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian, review penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Subjek dan objek penelitian, metode dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISA DATA

Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan data – data yang diperoleh selama penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Organisasi

Menurut Mahsun (2013: 1), organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Kumpulan pedagang, kumpulan mahasiswa, kumpulan pegawai, kumpulan pengusaha dan bahkan kumpulan para pengangguran pun merupakan suatu organisasi jika mereka mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai bersama.

2.1.2 Tipe Organisasi

Tujuan tiap-tiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada tipe organisasinya. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) tipe organisasi, yaitu:

a. *Pure-Profit Organizations*

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor dan kreditor.

b. *Quasi-Profit Organizations*

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor dan para anggota.

c. *Quasi-Nonprofit Organizations*

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta dan kreditor.

d. Pure-Nonprofit Organizations

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dan sebagainya.

2.1.3 Pengertian Sektor Publik

Menurut Mahsun (2013: 7), sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi adalah contoh sektor publik.

2.1.4 Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang non-profit oriented. Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti non-profit. Anggapan ini kurang tepat, karena organisasi sektor publik ada yang bertipe quasi nonprofit. Quasi nonprofit bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi pendapatan negara atau daerah. Perlu ditegaskan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi sosial, bukan hanya organisasi nonprofit dan juga bukan hanya organisasi pemerintahan. “Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui

pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum” (Mahsun, dkk 2013: 13).

2.1.5 Konsep Dasar Pengukuran Kinerja Sektor Publik

a. Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2013 :1), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kemudian menurut Robertson (2002) yang dikutip oleh Mahsun (2013), pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan Efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sementara menurut Lohman (2003) yang dikutip oleh Mahsun (2013), pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivikasi dari tujuan strategis organisasi.

b. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi

Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk

mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat.

2. **Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja**
Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi- indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilanutama (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*).
3. **Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran Organisasi**
Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif yang berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan, kemudian penyimpangan negatif yang berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan, dan penyimpangan nol yang berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.
4. **Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan *feedback* untuk dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi dalam melakukan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya, landasan dalam pemberian *reward-pinishment* kepada manajer atau anggota organisasi, penilaian kemajuan organisasi, serta dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

c. Fokus Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Lohman (2003) yang dikutip oleh Mahsun (2013: 25), pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran ini merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih terwujud dan terukur. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan.

d. Aspek-aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Oleh karena sifat dan karakteristiknya yang unik maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat laba, tidak hanya efisiensi dan juga tidak hanya ukuran finansial. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek, antara lain (Mahsun, 2013):

1. Kelompok masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Kelompok proses (*Process*) adalah ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
 3. kelompok keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
 4. Kelompok hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
 5. Kelompok manfaat (*Benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
 6. Kelompok dampak (*Impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.
- e. Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik
1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
Penilaian/pengukuran kinerja berfungsi sebagai tonggak (*milestone*) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.
 2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya

mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi (*achievement culture*) di dalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfer organisasi sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Untuk menciptakan atmosfer itu diperlukan perbaikan kinerja secara terus-menerus.

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward*, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau *punishment* misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran. Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem *reward*, insentif, dan gaji yang memiliki hubungan yang jelas dengan *knowledge*, *skill*, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi.

5. Memotivasi pegawai

Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang

berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.

6. Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, laporan kinerja diperlukan oleh manajer untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Bagi pihak eksternal, informasi kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik.

f. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi menurut BPKP (2000) yang dikutip oleh Mahsun (2013):

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja

2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati
5. Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi

g. Pengukuran Kinerja *Value for Money*

“Pengukuran *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan Efektifitas suatu kegiatan, program, dan organisasi” (Mahmudi, 2015). Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Karena pentingnya konsep tersebut, maka sering kali dikatakan bahwa inti pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan Efektifitas.

1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi terkait dengan pengkonversian *input* primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal

yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisien terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

3. Pengukuran Efektifitas

Efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisien pada *output* atau proses, maka Efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

2.2 **Reviu Penelitian Sebelumnya**

Para evaluator menyatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi sistem pelaporan kinerja dan sistem pelaporan keuangan yang terpisah, seperti pelaporan kinerja (LKjIP) hanya dianggap sebagai formalitas, sehingga belum bisa memberikan *feedback* yang optimal

bagi perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan produktivitas pegawai. Kendala dalam penyusunan LKjIP juga masih terjadi yaitu penyusunan LKjIP yang dilakukan secara manual mempersulit dan memperlambat proses pelaporan kinerja instansi pemerintah. Selain itu masih terdapat instansi pemerintah yang lebih mengutamakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga masih terjadi manipulasi data dalam penyusunan LKjIP.

2.2.1 Taufik (2013) mengungkapkan bahwa rendahnya angka capaian kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah, disebabkan, masih kurangnya komitmen kepala daerah dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi yang akuntabel. Ini dibuktikan dengan begitu banyaknya kepala daerah yang terjerat dalam kasus hukum. Selain itu hasil temuan dari kegiatan *monitoring* dan evaluasi belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan, sinkronisasi, keterbukaan pengelolaan, serta pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan dan program. Implementasi LKjIP juga belum maksimal karena adanya faktor-faktor seperti rendahnya kemampuan PNS dan belum dimilikinya informasi data yang berkualitas dalam pembuatan LKjIP. Maka dari itu LKjIP belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai alat pengendalian. Hasil penelitian Subastian (2015) di Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga menyimpulkan belum maksimalnya implementasi LKjIP, sehingga belum dijadikannya LKjIP sebagai pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja periode kedepan.

2.2.2 Santoso (2013) menyatakan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pedayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 serta dimensi akuntabilitas. Namun masih harus dilakukan perbaikan dalam bentuk penyajian laporan. Kendala dalam penyajian LKjIP pun juga masih ada yaitu tidak pastinya

indikator dan penilaian kinerjanya. Maka dari itu diperlukan peran pemerintah pusat dalam menetapkan acuan yang bersifat baku dalam penyusunan LKjIP mulai dari jenis dan ukuran huruf, pemakaian simbol, angka, dan angka yang harus ditentukan. Hal ini didukung penelitian Pamungkas (2012) yang menyimpulkan bahwa dukungan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai faktor yang relatif dominan dalam menegakkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun perlu adanya dukungan penerapan akuntansi publik dan peran pengawasan dari pusat serta ketentuan mulai dari pengukuran, penyajian, dan pelaporan yang lebih baku.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian diantaranya adalah penelitian ini menggunakan objek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dengan dokumen LKjIP Tahun 2019. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah berbasis akuntabilitas yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKjIP sekaligus faktor-faktor penyebab terjadinya kendala tersebut.

2.3 Kerangka Penelitian

Laporan kinerja merupakan instrumen atau alat yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui ketercapaian tujuan suatu organisasi dalam hal ini instansi pemerintah. Salah satu laporan kinerja yang bisa dilakukan oleh manajemen di instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem ini diyakini mampu untuk menumbuhkan sikap akuntabel didalam tubuh instansi pemerintahan. Tidak hanya sekedar pembuatan sistem, namun sistem ini juga diukur dalam pengukuran kinerja yang berbasis akuntabilitas, yaitu dengan penyusunan dan pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data

kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi dan (2) data eksternal atau data dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara reguler misalnya bulanan, triwulanan, dan semester, dan seterusnya. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

Pengukuran kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Seiring dengan perkembangan LKjIP ini ternyata masalah dan kekurangan masih juga terjadi, contohnya adalah LKjIP hanya dibuat

sebagai formalitas semata, bahkan instansi cenderung menyajikan angka capaian yang tidak apa adanya dan tidak jarang memanipulasi data sehingga LKjIP tidak sesuai kenyataan yang ada. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa sampai pada saat ini implementasi LKjIP di Kabupaten Wonogiri belum optimal. Kendala masih saja muncul dibuktikan dengan beberapa instansi pemerintahan yang kesusahan memberikan nilai dalam menyusun LKjIP. Sehingga nilai di dalam laporan masih belum memenuhi standard yang sudah ditentukan sebelumnya oleh masing masing instansi pemerintah itu sendiri.

LKjIP seharusnya bisa dibuat sebagai alat pengendalian internal oleh masing masing instansi pemerintahan dengan membuat perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan informasi yang diperoleh dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemanfaatannya yaitu sebagai bahan evaluasi capaian kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, dan lain sebagainya.

LKjIP juga diharapkan bisa saja dibuat sebagai target untuk menumbuhkan prestasi kerja karena memang di dalam LKjIP akan muncul penilaian bagaimana akuntabilitas instansi pemerintah. Diharapkan semakin tinggi angka capaian kinerja dalam LKjIP maka semakin tinggi pula prestasi kerja dari instansi pemerintah tersebut. Dengan semakin mengoptimalkan implementasi LKjIP ini diharapkan terciptanya instansi pemerintahan yang *good governance* atau pemerintahan yang baik akan terbentuk dengan baik. Tidak hanya itu, pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab juga akan memicu semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah yang ada di Indonesia karena LKjIP dipublikasikan secara luas.

Gambar 2.3
Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Sekaran (2011: 46), penelitian studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi yang lain dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis adalah data-data atau dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2019 .

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam memperoleh data-data atau dokumen yang diperlukan tersebut diantaranya:

3.2.1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih oleh peneliti adalah Kepala Bidang selaku pelaksana program kegiatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Narasumber tersebut dipilih berdasarkan relevansinya terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti yang nantinya digunakan untuk mendukung proses penelitian ini.

3.2.2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang diambil dari Dokumen arsip. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang diambil dari arsip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019.

3.3. Instrumen Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019.

3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah :

3.4.1. Melakukan pengukuran terhadap kinerja *input* dan *output* dari masing-masing program. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja dengan penekanan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

a. Mengukur Kinerja Masukan (*Input*)

Ukuran kinerja *input* mengindikasikan jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program, aktivitas, atau organisasi. Pengukuran *input* dilakukan dengan cara membandingkan *input* sekunder dengan *input* primer. Biaya *input* tersebut dikaitkan dengan *output* dengan cara membebaskan ke anggaran program yang bersangkutan. Indikator *input* yang digunakan indikator finansial berupa anggaran.

$$\text{Nilai Kinerja Input} = \frac{\text{Capaian Kinerja Input}}{\text{Target Kinerja Input}} \times 100\%$$

b. Mengukur Kinerja Keluaran (*Output*)

Pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Pengukuran *output* berbentuk kuantitatif keuangan atau kuantitatif nonkeuangan

$$\text{Nilai Kinerja Output} = \frac{\text{Capaian Kinerja Output}}{\text{Target Kinerja Output}} \times 100\%$$

3.4.1 Pengukuran kinerja 3E

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode value for money, yaitu suatu metode pengukuran kinerja dengan menilai 3 aspek yaitu kinerja ekonomis, kinerja efisiensi, dan kinerja efektifitas.

a. Pengukuran kinerja Ekonomis

Pengukuran kinerja ekonomi dari suatu organisasi merupakan pengukuran yang berkaitan dengan sejauh mana organisasi tersebut dapat meminimalkan input *resource* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros atau pengeluaran yang tidak produktif. Secara sistematis rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{input}}{\text{input value}} \times 100\%$$

b. Pengukuran kinerja Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan yang berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Secara sistematis rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

c. Pengukuran kinerja Efektifitas

Efektifitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Perhitungan tingkat Efektif menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

3.5 Pengujian Kredibilitas Data

uji kredibilitas data yakni adengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi lain, dan member check.

3.5.1 Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji data yang ada, maka dilakukan pada kepala sekolah, yayasan, dan guru. Dari tiga sumber data tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian diminta kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.

3.5.2 Triangulasi teknik dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara akan dicek dengan teknik observasi, dokumentasi. Bila dengan berbagai teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan yang dianggap benar.

3.5.3 Triangulasi waktu dalam pengujian kredibilitas data dilakukan melakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, obeservasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Bila dengan waktu yang berbeda dan berulang-ulang maka akan ditemukan kepastian data.

Selain triangulasi, uji kredibilitas yang lain adalah menggunakan bahan referensi yang mendukung seperti hasil wawancara. Selanjutnya uji kredibilitas yang dipakai yaitu member check, yaitu dari data yang diperoleh maka dikonfirmasi baik kepada individu yang bersangkutan atau kelompok diskusi pemberi data untuk melihat mana data yang disepakati dan mana yang ditolak. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani, supaya lebih otentik, sehingga dapat dijadikan bukti bahwa peneliti telah melakukan member check. Selanjutnya pengecekan keabsahan data juga dilakukan dengan uji transferability. Transferability dalam penelitian kualitatif adalah nilai transfer yang bergantung pada si pemakai. Oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

Pengecekan keabsahan data selanjutnya adalah uji dependability, yaitu audit yang dilakukan oleh pembimbing, yaitu Estiningtyastuti, S.E.,M.M.,M.Hum dalam hal ini pembimbing skripsi peneliti, untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Pengecekan keabsahan data selanjutnya adalah confirmability, yaitu menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Pengukuran Kinerja *Input* dan *Output*

Pengukuran kinerja *Input* dan *Output* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2019:

4.1.1 Pengukuran Kinerja *Input*

Ukuran *input* mengindikasikan jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program, aktivitas atau organisasi. Indikator *input* yang digunakan adalah indikator finansial berupa anggaran. Pengukuran *input* dilakukan dengan cara membandingkan *input* sekunder (realisasi *input*) dengan *input* primer (anggaran). Secara sistematis kinerja *input* diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Input} = \frac{\text{Capaian Kinerja Input}}{\text{Target Kinerja Input}} \times 100\%$$

a. Pengukuran Kinerja *Input* untuk Urusan Pendidikan

Berikut disajikan tabel pengukuran kinerja input untuk program urusan pendidikan berdasarkan data anggaran dan realisasi tahun 2019.

Tabel 4.1. Pengukuran Nilai Kinerja input Berdasarkan Data Anggaran dan Realisasi Urusan Pendidikan Periode 2019

No	Urusan Dan Program	Alokasi	Realisasi	%
I	Urusan Pendidikan	192.778.520.018	185.501.800.271	96,23
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	614.153.000	609.595.900	99,26
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	162.034.286.218	155.504.590.413	95,97
3	Program Pendidikan Non Formal	3.420.169.000	2.875.216.877	84,07
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	20.753.275.800	20.609.380.216	99,31
5	Program Managemen Pelayanan Pendidikan	136.636.000	84.222.265	61,64
6	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin	5.820.000.000	5.818.794.600	99,98

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa urusan pendidikan terdiri atas enam kegiatan pendukung dengan total dana anggaran sebesar 192.778.520.018 rupiah dan dana terealisasi sebesar 185.501.800.271 rupiah sehingga diperoleh nilai kinerja *input* sebesar 96,23%. Berdasarkan kategori penilaian kinerja *input*, untuk kegiatan program Pendidikan Anak Usia Dini, program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan program pelayanan pendidikan masyarakat miskin, masuk dalam kategori “Sangat Baik” karena nilai kinerja input rata-rata % capaian >90. Program Pendidikan Non Formal masuk kategori “baik” karena nilai kinerja input berada dalam interval 75.00% - 89.99%. Program Management Pelayanan Pendidikan masuk kategori “kurang” karena nilai kinerja input berada dalam interval 50.00% - 64.99%. Secara keseluruhan nilai kinerja *input* untuk urusan pendidikan berdasarkan kategori penilaian masuk dalam kategori “Sangat Baik” karena mampu mencapai tingkat kinerja *input* sebesar 96,23%.

b. Pengukuran Kinerja *Input* untuk Urusan Kebudayaan

Berikut disajikan tabel pengukuran kinerja *input* untuk urusan kebudayaan berdasarkan data anggaran dan realisasi tahun 2019.

Tabel 4.2. Pengukuran Nilai Kinerja Input Berdasarkan Data Anggaran dan Realisasi Urusan Kebudayaan

No	Urusan Dan Program	Alokasi	Realisasi	%
II	Urusan Kebudayaan	418.814.000	416.123.600	99,36
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	186.334.000	186.274.000	99,97
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	132.480.000	131.874.600	99,54

3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100.000.000	97.975.000	97,98
---	---	-------------	------------	-------

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa urusan kebudayaan terdiri atas tiga kegiatan pendukung dengan total danan anggaran 418.814.000 rupiah dan dana terealisasi sebesar 416.123.600 rupiah sehingga diperoleh nilai kinerja *input* sebesar 99, 36%. Berdasarkan kategori penilaian, untuk kegiatan program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya, dan program pengelolaan keragaman budaya masuk dalam kategori “Sangat Baik” karena mencapai tingkat kinerja *input* >90%.

4.1.2 Pengukuran Nilai Kinerja *Output*

Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Pengukuran output berbentuk kuantitatif keuangan atau kuantitatif nonkeuangan. Pengukuran kinerja output dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja output dengan target kinerja output. Secara sistematis nilai kinerja output dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Output} = \frac{\text{Capaian Kinerja Output}}{\text{Target Kinerja Output}} \times 100\%$$

- a. Pengukuran Kinerja *Output* untuk urusan pendidikan atau (Peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kualitas pendidikan)
Berikut ini disajikan tabel pengukuran kinerja *output* untuk urusan pendidikan (peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kualitas pendidikan) berdasarkan data anggaran dan realisasi tahun 2019

Tabel 4.3. Pengukuran Nilai Kinerja Output Berdasarkan Data Anggaran dan Realisasi Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	98.45	99.59	101.16
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89.80	94.66	105.41
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	101.51	102.98	101.45
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	100	101.34	101.34
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90	84.17	93.52
6	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	99.96	99.96
7	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	99.2	99.83	100.64
8	Nilai Rata-rata US SD/MI	Jumlah	7.84	6.90	88.01
9	Nilai Rata-rata UN SMP/MTs	Jumlah	56	53.05	94.73
10	Angka Melek Huruf	%	99.9	99.31	99.41
11	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.21	6.89	95.56
12	Harapan lama sekolah	Tahun	14.08	12.48	88.64
Rata – rata capaian					97.49

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai kinerja output untuk urusan pendidikan dengan dua belas indikator pendukung adalah 97, 49%.

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, dengan capaian kinerja 101.16%, pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, dengan capaian kinerja 105.41%, pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, dengan capaian kinerja 101.45%, pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B, dengan capaian kinerja 101.34%, pada indikator Angka Kelulusan SMP/MTs, dengan capaian kinerja 100.64%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, dengan capaian kinerja 93.52% hal ini disebabkan karena tingginya angka mutasi peserta didik keluar dari Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019, menurut data di bagian umum angka mutasi peserta didik tahun 2019 melebihi 250 peserta didik. Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B tahun 2019 di Kabupaten Wonogiri juga dipengaruhi oleh banyaknya penduduk dengan status kependudukan Kabupaten Wonogiri tetapi tidak tinggal menetap dan bersekolah di Kabupaten Wonogiri.
2. Angka Kelulusan SD/MI, dengan capaian kinerja 99.96%, berdasarkan data yang tercatat pada Bidang Pendidikan Dasar, hal ini disebabkan karena ada peserta didik yang tidak mengikuti US yang dikarenakan drop out dan meninggal dunia.
3. Nilai Rata-rata US SD/MI, dengan capaian kinerja 88.01% dan Nilai Rata-rata UN SMP/MTs, dengan capaian kinerja 94.73%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 mulai diterapkan soal HOTS (*Higher Order Thinking Skills*) dimana peserta didik belum mempunyai gambaran tentang soal tersebut.
4. Angka Melek Huruf, dengan capaian kinerja 99.41%, Angka rata-rata lama sekolah, dengan capaian kinerja 95.56%, Harapan lama sekolah, dengan capaian kinerja 88.64%, ketiga indikator tersebut dihitung berdasarkan jenjang pendidikan formal terakhir penduduk Kabupaten Wonogiri dengan usia 25 tahun keatas. Ketiga indikator tersebut akan selalu sulit tercapai karena sebagian besar penduduk

Kabupaten Wonogiri setelah lulus SLTA/ sederajat pergi merantau dan menetap sebagai penduduk ditempat lain.

- b. Pengukuran Kinerja *Output* untuk urusan Kebudayaan (Peningkatan Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Masyarakat)

Berikut ini disajikan tabel pengukuran kinerja *output* untuk sasaran Kedua (Peningkatan Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Masyarakat) berdasarkan data anggaran dan realisasi tahun 2019

Tabel 4.4. Pengukuran Nilai Kinerja Output Berdasarkan Data Anggaran dan Realisasi Urusan Kebudayaan (Peningkatan Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Masyarakat)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Group kesenian yang aktif	Jumlah	255	255	100.00
2	Jumlah event budaya tingkat kabupaten	Jumlah	7	7	100.00
3	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah	3	3	100.00

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai kinerja output untuk urusan kebudayaan dengan tiga indikator pendukung adalah 100%, angka tersebut menunjukkan bahwa masing-masing kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan output sesuai dengan target yang ditentukan. Berdasarkan kategori penilaian, angka capaian 100% tersebut menyatakan bahwa nilai kinerja output untuk sasaran kedua Kedua

(Peningkatan Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Masyarakat) masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.

4.2 Pengukuran Kinerja 3E (Ekonomi, Efisiensi dan Efektifitas)

4.2.1 Pengukuran Kinerja Ekonomi

Pengukuran kinerja ekonomi dari suatu organisasi merupakan pengukuran yang berkaitan dengan sejauh mana organisasi tersebut dapat meminimalkan input *resource* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros atau pengeluaran yang tidak produktif. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur nilai ekonomi suatu program atau kegiatan yaitu dengan cara membandingkan harga yang digunakan oleh organisasi sektor publik dengan organisasi sejenis, membandingkan dengan harga pasar, atau membandingkan dengan anggaran yang telah disetujui. Nilai ekonomi dari program-program yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 dapat diukur dengan membandingkan realisasi dana yang digunakan dengan dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan pemanfaatan sumber daya melebihi anggaran berarti menunjukkan adanya pemborosan. Secara sistematis rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi adalah sebagai berikut:

$$Ekonomi = \frac{input}{input\ value} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Periode 2019

Input Value : Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Periode 2019

Kriteria ekonomis menurut Mahsun (2013: 186) adalah :

a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti ekonomis.

- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti ekonomis berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak ekonomis.

Tabel 4.5. Pengukuran Ekonomi Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2019

No	Urusan dan Program	Indikator		Nilai Ekonomi %	Ket
		Input Value (Anggaran)	Input (Realisasi)		
I	Urusan Pendidikan	192.778.520.018	185.501.800.271	96,23	Ekonomis
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	614.153.000	609.595.900	99,26	Ekonomis
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	162.034.286.218	155.504.590.413	95,97	Ekonomis
3	Program Pendidikan Non Formal	3.420.169.000	2.875.216.877	84,07	Ekonomis
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	20.753.275.800	20.609.380.216	99,31	Ekonomis
5	Program Managemen Pelayanan Pendidikan	136.636.000	84.222.265	61,64	Ekonomis
6	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin	5.820.000.000	5.818.794.600	99,98	Ekonomis
II	Urusan Kebudayaan	418.814.000	416.123.600	99,36	Ekonomis
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	186.334.000	186.274.000	99,97	Ekonomis
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	132.480.000	131.874.600	99,54	Ekonomis
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100.000.000	97.975.000	97,98	Ekonomis
JUMLAH		197.197.334.018	185.917.923.871	96,23	Ekonomis

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut dapat dilihat bahwa nilai kinerja ekonomi untuk urusan pendidikan mencapai angka 98,32 persen dan untuk urusan kebudayaan mencapai angka 99,36 persen. Berdasarkan nilai kinerja ekonomi yang dicapai oleh urusan pendidikan dan kebudayaan tersebut maka termasuk dalam kategori “Ekonomis” karena masing-masing program dapat menggunakan input lebih rendah dari anggaran yang telah ditentukan.

4.2.2 Pengukuran Kinerja Efisiensi

Menurut Mahsun (2014: 181), efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi terkait dengan hubungan yang berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Secara sistematis rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja efisiensi adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase Realisasi Program Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

Input : Persentase Nilai Ekonomi Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

Kriteria Efisiensi menurut Mahsun (2013: 187) adalah :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efisien.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efisien berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efisien.

Berikut disajikan tabel penilaian efisiensi untuk Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2019.

Tabel 4.6. Pengukuran Kinerja Efisiensi Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

Program	Indikator		Nilai Efisiensi (%)	Keterangan
	<i>Input (%)</i>	<i>Output (%)</i>		
Urusan Pendidikan	96,23	97,49	101,31	Efisien
Urusan Kebudayaan	99,36	100	100,64	Efisien
Jumlah	96,23	98,74	102,61	Efisien

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai kinerja efisiensi untuk urusan pendidikan mencapai angka 101,31 persen dan Urusan Kebudayaan mencapai angka 100,64 persen. Berdasarkan nilai kinerja efisiensi yang dicapai oleh kedua urusan tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2019 termasuk dalam kategori “Efisien” karena masing-masing program mampu menghasilkan tingkat *output* yang lebih tinggi dibandingkan tingkat *input* yang digunakan.

4.2.3 Pengukuran Kinerja Efektifitas

Menurut Mahsun (2013: 182), Efektifitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Perhitungan tingkat Efektif menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Outcome : Persentase tingkat pencapaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

Output : Persentase hasil perhitungan nilai efisiensi Tahun 2019

Kriteria Efektifitas menurut Mahsun (2013: 187) adalah :

- a. Jika diperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 100% maka efektif.
- b. Jika diperoleh nilai antara 85% s.d 99% maka cukup efektif.
- c. Jika diperoleh nilai antara 65% s.d 84% maka kurang efektif.
- d. Jika diperoleh nilai kurang dari atau sama dengan 64 % maka tidak efektif.

Hasil perhitungan efektifitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Pengukuran Kinerja Efektifitas Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

Program	Indikator		Nilai Efektif (%)	Keterangan
	<i>Outcome</i> (%)	<i>Output</i> (%)		
Urusan Pendidikan	97.49	101.31	96.23	Cukup Efektif
Urusan Kebudayaan	100.00	100.64	99.36	Cukup Efektif
Jumlah	98.74	102.61	96.23	Cukup Efektif

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai kinerja efektifitas untuk urusan pendidikan mencapai angka 96.23 persen dan Urusan Kebudayaan mencapai angka 99.36 persen. Berdasarkan nilai kinerja efektifitas

yang dicapai oleh kedua urusan tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2019 termasuk dalam kategori “Cukup Efektif” karena masing-masing program mampu menghasilkan tingkat *outcome* yang lebih rendah dibandingkan tingkat *output* yang digunakan.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini merupakan analisis kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan pendekatan *value for money*. *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: (1) ekonomi, terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, (2) efisiensi, merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu, dan (3) Efektifitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo 2002: 4). Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa:

4.3.1 Ekonomi

Urusan pendidikan melaksanakan enam program kegiatan dengan menyerap anggaran sebesar 96,23 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya penghematan anggaran karena menggunakan *input* lebih rendah dari pada *input value* yang sudah ditentukan dan masuk kategori “ekonomis”. Urusan kebudayaan melaksanakan tiga program kegiatan dengan menyerap anggaran sebesar 99,36 persen. angka tersebut menunjukkan adanya penghematan anggaran karena menggunakan *input* lebih rendah dari pada *input value* yang sudah ditentukan dan masuk kategori “ekonomis”. Secara keseluruhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 menyerap anggaran sebesar 96,23% dan masuk dalam kategori “ekonomis”.

4.3.1 Efisiensi

Berdasarkan ukuran efisiensi, dengan membandingkan tingkat kinerja *output* dan tingkat kinerja *input*-nya untuk urusan pendidikan mencapai angka sebesar 101,31 persen. Angka tersebut menunjukkan nilai kinerja *output* lebih besar daripada nilai kinerja *input*-nya sehingga dikategorikan “efisien”. Urusan kebudayaan mencapai angka sebesar 100,64 persen. Angka tersebut menunjukkan nilai kinerja *output* lebih besar daripada nilai kinerja *input*-nya sehingga dikategorikan “efisien”. Secara keseluruhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 mencapai angka 102.61% sehingga dikategorikan “efisien”.

4.3.1 Efektifitas

Untuk ukuran efektifitas, urusan pendidikan mencapai tingkat ketercapaian 96,23 persen dan berdasarkan kategori penilaian dikategorikan “cukup efektif” dalam mencapai tujuan organisasi. Urusan kebudayaan mencapai tingkat ketercapaian 99,36 persen dan berdasarkan kategori penilaian dikategorikan “cukup efektif”. Secara keseluruhan nilai efektifitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 mencapai 96,23 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa urusan kebudayaan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 cukup maksimal dalam memberikan pelayanan yang tepat bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri sebagai penerima manfaat.

Berikut disajikan tabel hasil pengukuran kinerja berdasarkan *value for money* untuk urusan pendidikan dan urusan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019.

Tabel 4.8 Hasil Pengukuran *Value for Money* Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

Nilai Ekonomi			
No	Program	Capaian	Keterangan
1	Urusan Pendidikan	96.23	Ekonomis
2	Urusan Kebudayaan	99.36	Ekonomis
Nilai Efisiensi			
No	Program	Capaian	Keterangan
1	Urusan Pendidikan	101.31	Efisien
2	Urusan Kebudayaan	100.64	Efisien
Nilai Efektifitas			
No	Program	Capaian	Keterangan
1	Urusan Pendidikan	96.23	Cukup Efektif
2	Urusan Kebudayaan	99.36	Cukup Efektif

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran kinerja *value for money* sudah ekonomis dalam menggunakan anggaran untuk belanja *input*, efisien dalam menghasilkan *output*, dan cukup efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Pada urusan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran kinerja *value for money* sudah ekonomis dalam menggunakan anggaran untuk belanja *input*, efisien dalam menghasilkan *output*, dan cukup efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan *value for money* dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Nilai kinerja *input* untuk urusan pendidikan mencapai tingkat kinerja *input* sebesar 96,23% dan urusan kebudayaan mencapai tingkat kinerja *input* sebesar 99,36%, secara keseluruhan capaian nilai kinerja *input* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2019 mencapai nilai 96,23% dengan kategori sangat baik.
- 5.1.2 Nilai kinerja *output* untuk urusan pendidikan mencapai nilai 97,49% dan untuk urusan kebudayaan nilai kinerja *output* mencapai nilai 100%, secara keseluruhan capaian nilai kinerja *output* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2019 mencapai nilai 98,83% dengan kategori sangat berhasil.
- 5.1.3 Nilai kinerja ekonomi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 mencapai 96.23% sehingga dikategorikan ekonomis, hal ini dikarenakan kedua urusan dapat dilaksanakan dengan menggunakan *input* yang tidak melebihi *input value* yang telah dianggarkan. Sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran untuk hal-hal yang tidak diperlukan.
- 5.1.4 Nilai kinerja efisiensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 mencapai 102.61% sehingga dikategorikan efisien, karena kedua urusan mampu menghasilkan tingkat *output* yang lebih tinggi dengan menggunakan tingkat *input* yang lebih rendah.
- 5.1.5 Nilai kinerja efektivitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 mencapai 96.23% sehingga dikategorikan cukup efektif.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penilaian *outcome* yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang tercantum di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 belum menggambarkan maksud dari *outcome* itu sendiri secara tepat. *Outcome* belum mengukur kepuasan masyarakat atas pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri. *Outcome* yang disajikan adalah capaian kinerja yang dibandingkan dengan target tahunan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada pengukuran hasil capaian kinerja organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- 5.3.1 Sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri meningkatkan capaian kinerja agar pada tahun berikutnya dalam pengukuran efektifitas memperoleh predikat efektif. Secara penilaian ekonomi dan efisiensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan programnya sudah ekonomis dan efisien, sehingga perlu dipertahankan untuk pelaksanaan program di periode berikutnya.
- 5.3.2 Sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dapat memperbaiki pengukuran kinerja *outcome* secara lebih tepat sesuai dengan tujuan yang diharapkan organisasi agar dapat dilihat dengan jelas apakah program tersebut tepat dijalankan dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, Santoso. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Lohman. 2003. Analisis Kuantitatif, Jogjakarta
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahsun. 2014. Teks Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2013. Akuntansi Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta.
- Nurhadi. 2017. Mahasiswa Demo Tuntut Transparansi Anggaran Pemkab MajeneSulbar:
<https://makassar.tribunnews.com/2017/05/22mahasiswa-demo-tuntut-anggaran-pemkab-majenen-sulbar>. Diakses tanggal 27 November 2017.
- Pertiwi. 2017. Warga Magelang Demo Tuntut Transparansi Dana Retribusi Daerah.
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3576525/warga-magelang-demo-tuntut-transparansi-dana-retribusi-desa>. Diakses tanggal 27 November 2017.
- Pamungkas, Bambang. 2012. Pengaruh Penerapan Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmiah Rangka Gading Volume 12, Nomor 2. Oktober 2012 : 82-93
- Robertson. 2002. Performance Measurement, Jogjakarta
- Sekaran, Uma. 2011. Research Methods for Business. Salemba Empat, Jakrat
- Taufiq Rohmat. 2013. Sistem Informasi Manajemen. Graha Ilmu, Yogyakarta
- _____, Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

_____, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006. tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

_____, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

_____, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

_____, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAMPIRAN